

KATA PENGANTAR

Rencana Kontinjensi merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan, tidak pernah terjadi. Penyusunan Rencana Kontinjensi ini dilakukan secara bersama antar lembaga dan pelaku penanggulangan bencana, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Dokumen Rencana Kontinjensi dalam menghadapi ancaman bencana banjir di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, disusun dalam rangka menghadapi musim penghujan tahun 2012 – 2013. Bencana banjir dapat menimbulkan dampak yang luas terutama pada terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dokumen rencana kontinjensi disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penanganan bencana Banjir di Kabupaten Majene, agar pada saat tanggap darurat dapat terkelola dengan cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi berbagai sumber daya para pemangku kepentingan (*stake holder*). Rencana Kontinjensi bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama antar lembaga pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Majene. Lingkup cakupannya meliputi ancaman bencana banjir Kabupaten Majene dalam musim penghujan 2012-2013.

Diharapkan Rencana Kontinjensi ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun komitmen para pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Majene, sehingga akan dapat mengurangi risiko dampak terutama terhadap masyarakatnya.

Tim Penyusun
Perencanaan Kontinjensi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Rencana Kontinjensi	2
C. Tujuan	2
D. Sifat Rencana Kontinjensi	3
E. Ruang Lingkup	3
F. Tahapan Penyusunan Rencana Kontinjensi	3
G. Aktifasi Rencana Kontinjensi	4
BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH	5
A. Geografi	5
B. Administrasi Pemerintah dan Demografi	6
C. Bentang Alam	7
D. Topografi	8
E. Kemiringan	8
F. Iklim	8
BAB III : PENILAIAN RISIKO, PENENTUAN KEJADIAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO	9
A. Penilaian Risiko DAN Penentuan Kejadian	9
B. Pengembangan Skenario	11
BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI	14
A. Kebijakan	14
B. Strategi	14
BAB V : PERENCANAAN SEKTORAL.....	16
A. Sektor Manajemen dan Koordinasi (Posko)	16
B. Sektor Pencarian dan Penyelamatan (SAR).....	19
C. Sektor Kesehatan	22
D. Sektor Logistik dan Dapur Umum	27

E. Sektor Sarana dan Prasarana (Infrastruktur)	29
BAB VI : RENCANA TINDAK LANJUT	33
BAB VII : PENUTUP.....	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No. 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Definisi bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu:

- Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*).
- Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat.
- Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Rangkaian bencana yang dialami Indonesia, khususnya pada beberapa tahun terakhir, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dirasakan kebutuhan untuk mengembangkan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana. Menyikapi hal tersebut tersebut diperlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah-langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Kebijakan yang telah ditempuh melalui pendirian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tingkat Kabupaten dan Kota yang bertanggungjawab terhadap proses pengembangan kebijakan. Proses berikutnya tidak kalah penting adalah memastikan bahwa provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional.

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana perlu dipastikan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam kerangka ini untuk meningkatkan kapasitas institusional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene perlu memantapkan perencanaan, untuk mewujudkan perencanaan tersebut, maka kami melakukan beberapa kegiatan antara lain yaitu menyusun kontinjensi plan.

B. Pengertian Rencana Kontinjensi

Kontinjensi adalah suatu kondisi yang bisa terjadi, tetapi belum tentu benar benar terjadi. Perencanaan kontinjensi merupakan suatu upaya untuk merencanakan sesuatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi. Oleh karena ada unsur ketidakpastian, maka diperlukan suatu perencanaan untuk mengurangi akibat yang mungkin terjadi.

Atas dasar pemikiran itu, maka perencanaan kontinjensi didefinisikan sebagai “Proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disetujui, tindakan manajerial dan teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi kejadian disusun agar dapat mencegah, atau mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi”.

Dari definisi tersebut, dapat diambil beberapa butir penting bahwa perencanaan kontinjensi :

- dilakukan sebelum keadaan darurat berupa proses perencanaan ke depan.
- lebih merupakan proses daripada menghasilkan dokumen.
- merupakan suatu proses pembangunan konsensus untuk menyepakati skenario dan tujuan yang akan diambil.
- merupakan suatu kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan langkah dan system penanganan yang akan diambil sebelum keadaan darurat terjadi.
- mencakup upaya-upaya yang bersifat mencegah dan juga membatasi konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi.

C. Tujuan

Rencana kontinjensi disusun bertujuan sebagai pedoman penanganan bencana banjir khususnya ketika banjir yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan gelombang pasang yang tinggi pada wilayah Kabupaten Majene. Rencana ini menjadi pedoman tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif serta sebagai dasar mobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (stake holder) yang mengambil peran dalam penyusunan kontinjensi plan.

D. Sifat Rencana Kontinjensi

Perencanaan/penyusunan rencana kontinjensi mempunyai ciri-ciri khas yang menjadi prinsip-prinsip perencanaan kontinjensi. Atas dasar pemahaman tersebut, rencana kontinjensi harus dibuat berdasarkan

- Partisipatif, melibatkan seluruh stakeholder terkait dan menetapkan peran dan tugas setiap sektor
- Disusun untuk menghadapi keadaan darurat dan merupakan rencana penanggulangan bencana untuk satu jenis bencana
- rencana kontinjensi mempunyai skenario yang disetujui bersama
- dilakukan secara transparan
- menyepakati konsensus yang telah dibuat bersama.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup cakupan luas ancaman banjir akibat tingginya curah hujan dan gelombang pasang air laut pada wilayah Kabupaten Majene. Dalam Rencana Kontinjensi ini dibatasi oleh batas administrasi di wilayah Kabupaten Majene yang meliputi Kawasan pesisir 8 kecamatan yaitu Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, Ulumanda dan Malunda.

F. Tahapan Penyusunan Rencana Kontinjensi

Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana banjir akibat tingginya curah hujan dan gelombang pasang air laut tentang pentingnya kontinjensi plan.
2. Pengumpulan data dan updating.
3. Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
4. Verifikasi data
5. Analisa data sumber daya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
6. Penyusunan rancangan awal kontinjensi plan.
7. Penyusunan naskah, pembahasan dan perumusan dokumen kontinjensi plan yang disepakati.
8. Institution hearing/konsultasi institusi hasil rumusan kontinjensi plan.
9. Penyebaran/diseminasi dokumen kontinjensi plan kepada semua pelaku penanggulangan bencana (multi stake holder)

G. Aktivasi Rencana Kontinjensi

Aktivasi rencana kontinjensi dilaksanakan setelah terdapat tanda-tanda peringatan dini akan datangnya ancaman bencana banjir akibat tingginya curah hujan dan gelombang pasang air laut pada wilayah Kabupaten Majene.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Geografi

Secara geografis Kabupaten Majene terletak antara $2^{\circ} 38' 45''$ – $3^{\circ} 38' 15''$ Lintang Selatan dan antara $118^{\circ} 45' 00''$ - $119^{\circ} 4' 45''$ Bujur Timur. Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 5 kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Jarak Kabupaten Majene ke ibukota Propinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km.

Secara administratif Kabupaten Majene berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran administratif Kabupaten Majene dapat dilihat pada gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Majene yang diambil dari Dokumen RTRW Kabupaten Majene dibawah ini.





B. Administrasi Pemerintah dan Demografi

Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km² atau 5,6% dari luas Propinsi Sulawesi Barat, terdiri atas 8 kecamatan dan 82 desa/ kelurahan. Adapun kecamatan di Kabupaten Majene adalah Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda.

Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas dibanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya yakni; 456,06 km² atau 48,10%, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,85 Km² atau 19,81%, sedangkan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, dengan luas wilayah masing-masing adalah Kecamatan Banggae 25,15 km² atau 2,65% dan Kecamatan Banggae Timur 3,17% dari luas total wilayah Kabupaten Majene.

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk tahun 2011, jumlah penduduk kabupaten Majene sementara adalah 153.869 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 75.020 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 78.849 jiwa. Dari hasil sensus tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Majene masih bertumpu di Kecamatan Banggae yakni sebesar 24,71 persen atau 38.015 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Banggae Timur sebesar 18,9 persen atau 29.071 jiwa sedangkan kecamatan lainnya berkisar antara 5 persen sampai 14 persen dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Tubo yang berpenduduk sebesar 8.364 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Majene 947.84 kilometer persegi dan didiami sebanyak 153.869 jiwa, maka tingkat kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Majene adalah 162 jiwa per kilometer persegi, dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di wilayah

Kecamatan Banggae yaitu 1.512 jiwa perkilometer persegi dan terendah adalah Kecamatan Ulumanda yaitu Kecamatan Ulumanda sebanyak 18 jiwa perkilometer persegi, dimana laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yaitu antara tahun 2000 sampai tahun 2011 adalah sebesar 1,97 persen. Lebih jelas terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah, Penyebaran dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Penyebaran	Kepadatan Penduduk
		L	P	Jumlah		
1	Banggae	18.697	19.318	38.015	24,7%	1.512
2	Banggae Timur	13.954	15.117	29.071	18,9%	968
3	Pamboang	10.238	10.943	21.181	13,8%	302
4	Sendana	9.960	10.787	20.747	13,5%	252
5	Tammeroddo Sendana	5.281	5.497	10.778	7,0%	195
6	Tube Sendana	4.102	4.262	8.364	5,4%	203
7	Malunda	4.234	4.183	8.417	5,5%	92
8	Ulumanda	8.554	8.742	17.296	11,2%	18
J U M L A H		75.020	78.849	153.869		162

C. Bentang Alam

Berdasarkan klasifikasi bentang lahan Kecamatan Banggae dan Banggae Timur merupakan wilayah yang relatif lebih datar, sedangkan wilayah kecamatan lainnya lebih dominan berupa wilayah berbukit dan pegunungan. Berdasarkan klasifikasi wilayah menurut kelas ketinggian tempat dari permukaan laut, wilayah Kabupaten Majene yang berada pada kelas ketinggian 100 - 500 m dpl mencapai 38,7% luas wilayah kabupaten dan yang berada pada ketinggian 500 - 1000 m dpl mencapai 35,98%.

D. Topografi

Berdasarkan klasifikasi bentang lahan Kecamatan Banggae dan Banggae Timur merupakan wilayah yang relatif lebih datar, sedangkan wilayah kecamatan lainnya lebih dominan berupa wilayah berbukit dan pegunungan. Berdasarkan klasifikasi wilayah menurut kelas ketinggian tempat dari permukaan laut, wilayah Kabupaten Majene yang berada pada kelas ketinggian 100 - 500 m dpl mencapai 38,7% luas wilayah kabupaten dan yang berada pada ketinggian 500 - 1000 m dpl mencapai 35,98%.

E. Kemiringan

Klasifikasi kemiringan lereng secara jelas mulai tergambar dengan memperhatikan tingkat ketinggian dari permukaan air laut. Dengan dominan ketinggian muka laut diatas 500 meter, maka tingkat kemiringan lereng alamnya sangat dominan pula dengan klasifikasi ketinggian diatas 40% yakni 66.519 Ha atau 69,12% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Majene. Bentang alam yang tergolong sebagai wilayah yang relative datar hanya mencakup 10,37% dari wilayah keseluruhan, yang berarti kemungkinan pengembangan wilayah terbangun relatif terbatas untuk tingkat daya dukung tanah yang tinggi. Wilayah kecamatan memiliki potensi pengembangan banyak di wilayah Kecamatan Banggae dan Malunda dengan nilai masing-masing adalah 2.171 Ha dan 2.582 Ha. pada kelas kemiringan lereng diatas 40% yang pada umumnya merupakan wilayah pegunungan banyak tersebar di wilayah Kecamatan Malunda dan Sendana yakni 47.787 Ha dan 11.445 Ha. Melihat kondisi alam yang pada umumnya merupakan wilayah perbukitan/ pegunungan potensi pengembangan akan memperhatikan kemungkinan pengembangan sector kehutanan dan perkebunan berdasarkan ketersediaan daya dukung alamnya. Berdasarkan pada kemiringan wilayah Kabupaten Maros, dapat dirinci sebagai berikut :

- Antara 0% – 2% meliputi luas 6.451 Ha atau 6.81% dari luas wilayah Kabupaten Majene;
- Antara 2% – 15% meliputi luas 3.377 Ha atau 3.56% dari luas wilayah Kabupaten Majene;
- Antara 15% – 40% meliputi luas 19.412 Ha atau 20.49% dari luas wilayah Kabupaten Majene;
- Kemiringan > 40% meliputi luas 65.519 Ha atau 69.12% dari luas wilayah Kabupaten Majene, meliputi wilayah kecamatan Sendana dan Ulumanda

F. Iklim

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya berbatasan dengan laut lepas (Selat Makassar dan Teluk Mandar). Kondisi iklim di Kabupaten Majene memiliki rata-rata temperatur berkisar 27⁰ C, dengan suhu minimum 22⁰ C dan suhu maksimum 30⁰ C. Jumlah curah hujan berkisar antara 1.148 – 1.653 mm/tahun dan jumlah hari hujan 167-199 hari/tahun.

BAB III
PENILAIAN RISIKO, PENENTUAN KEJADIAN DAN
PENGEMBANGAN SKENARIO

A. Penilaian Risiko dan Penentuan Kejadian

Penilaian bahaya dilakukan melalui identifikasi jenis ancaman dan pembobotan ancaman.

1. Identifikasi jenis ancaman bencana dengan menggunakan catatan
2. data/sejarah kejadian bencana.
3. Pembobotan/scoring ancaman/bahaya dari beberapa jenis ancaman yang ada di wilayah Kabupaten Majene dan dilakukan penilaian satu per satu.
4. Tiap jenis ancaman diberikan nilai/bobot dan di-plot ke dalam tabel dibawah ini.

Berdasarkan hasil analisis pendataan lokasi rawan bencana di Kabupaten Majene pada tahun 2012 ini, maka lokasi-lokasi yang memiliki resiko rawan bencana diberikan simbol atau tanda pada peta rawan bencana sebagai berikut:

No.	Jenis Ancaman/ Bahaya	Probabilitas	Dampak
1	Bencana tanah longsor	4	2
2	Banjir	4	3
3	Puting Beliung		
4	Abrasi pantai	5	3
5	Gempa Bumi		
6	Tsunami		
7	Kebakaran		
8	Kejadian Luar Biasa	1	2
9	Konflik Sosial	1	1

Untuk rencana kontinjensi ini, untuk menghadapi musim penghujan yang sudah tiba, maka penentuan kejadian dibatasi hanya pada lokasi-lokasi yang memiliki resiko rawan bencana Banjir akibat diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan gelombang pasang yang tinggi pada wilayah Kabupaten Majene

Adapun lokasi-lokasi yang rawan bencana diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan gelombang pasang yang tinggi pada wilayah Kabupaten Majene tersebut diuraikan per kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Banggae

- Persentase luas area rawan banjir lebih kurang 60 % dari total luas kecamatan.
- Penyebab utamanya yaitu Curah hujan yang tinggi, Gelombang pasang air laut yang tinggi, terjadi pelanggaran tata ruang wilayah, system drainase yang buruk dan disiplin masyarakat membuang sampah pada saluran air dan laut;
- Lokasi Tempat Evakuasi : Kompleks Rumah Sakit umum Daerah Kab. Majene.

2. Kecamatan Banggae Timur

- Persentase luas area rawan banjir 50 % dari total luas kecamatan.
- Penyebab utamanya yaitu Curah hujan yang tinggi, Gelombang pasang air laut yang tinggi, terjadi pelanggaran tata ruang wilayah, system drainase yang buruk dan disiplin masyarakat membuang sampah pada saluran air dan laut;
- Lokasi Tempat Evakuasi : di kantor kecamatan dan ditempat tinggi perbukitan.

3. Kecamatan Pamboang

- Persentase luas area rawan banjir 30 % dari total luas kecamatan.
- Penyebab utamanya yaitu Curah hujan yang tinggi, Gelombang pasang air laut yang tinggi, terjadi pelanggaran tata ruang wilayah, system drainase yang buruk dan disiplin masyarakat membuang sampah pada saluran air dan laut;
- Lokasi Tempat Evakuasi : di tempat tinggi perbukitan.

4. Kecamatan Sendana

- Persentase luas area rawan banjir 34 % dari luas kecamatan.
- Penyebab utamanya yaitu Curah hujan yang tinggi, Gelombang pasang air laut yang tinggi, terjadi pelanggaran tata ruang wilayah, system drainase yang buruk dan disiplin masyarakat membuang sampah pada saluran air dan laut;
- Lokasi Tempat Evakuasi : di kantor kecamatan dan ditempat tinggi perbukitan.

5. Kecamatan Tammeroddo Sendana

- Persentase luas area rawan banjir 20 % dari total luas kecamatan.
- Penyebab utamanya yaitu Curah hujan yang tinggi, Gelombang pasang air laut yang tinggi, terjadi pelanggaran tata ruang wilayah, system drainase yang buruk dan disiplin masyarakat membuang sampah pada saluran air dan laut;
- Lokasi Tempat Evakuasi : di kantor kecamatan dan ditempat tinggi perbukitan.

6. Kecamatan Tubo Sendana

- Persentase luas area rawan banjir 10 % dari total luas kecamatan.
- Penyebab utamanya yaitu Curah hujan yang tinggi, Gelombang pasang air laut yang tinggi, terjadi pelanggaran tata ruang wilayah, system drainase yang buruk dan disiplin masyarakat membuang sampah pada saluran air dan laut;
- Lokasi Tempat Evakuasi : di kantor kecamatan dan ditempat tinggi perbukitan.

7. Kecamatan Ulumanda

- Persentase luas area rawan banjir 6 % dari total luas kecamatan.
- Penyebab utamanya yaitu Curah hujan yang tinggi, Gelombang pasang air laut yang tinggi, terjadi pelanggaran tata ruang wilayah, system drainase yang buruk dan disiplin masyarakat membuang sampah pada saluran air dan laut;
- Lokasi Tempat Evakuasi : di kantor kecamatan dan ditempat tinggi perbukitan.

8. Kecamatan Malunda

- Persentase luas area rawan banjir 30 % dari total luas kecamatan.
- Penyebab utamanya yaitu Curah hujan yang tinggi, Gelombang pasang air laut yang tinggi, terjadi pelanggaran tata ruang wilayah, system drainase yang buruk dan disiplin masyarakat membuang sampah pada saluran air dan laut;
- Lokasi Tempat Evakuasi : di kantor kecamatan dan ditempat tinggi perbukitan.

B. Pengembangan Skenario

Berdasarkan peta wilayah, dapat diidentifikasi masyarakat dan daerah/lokasi yang terancam bencana (daerah rawan bahaya/bencana) sehingga dapat diperkirakan luas/besarnya dampak bencana yang mungkin terjadi. Tingkat ancaman yang terjadi akibat tingginya curah hujan dan tingginya gelombang pasang air laut yang diasumsikan terjadi pada malam hari di bulan Desember 2012 – Bulan Januari 2013 dapat berupa ancaman ringan, sedang dan berat dengan perkiraan jumlah penduduk terancam sebanyak 59.493 jiwa.

Skenario bencana banjir Kabupaten Majene, Terjadi waktu malam hari/ tengah malam

Bencana akibat curah hujan tinggi dan bobolnya tanggul pada 1 (satu) titik

Kejadian hujan pada musim hujan Desember 2012 - Januari 2013, Tanggap darurat 7 (Tujuh) hari

NO	KECAMATAN/KELURAHAN		TERANCAM		TERANCAM SERIUS		LUKA-LUKA		HILANG		MENGUNGSI		PINDAH / LAIN2		
	Kecamatan	Jml Desa	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Banggae	8	38.015	60	22.809	0,01	2,28	0,2	46	0,00	0	0,4	91	99,4	22.670
2	Banggae Timur	9	29.071	50	14.536	0,00	0,00	0,3	44	0,00	0	0,2	29	99,5	14.463
3	Pamboang	15	21.181	30	6.354	0,10	6,35	0,4	25	0,00	0	0,4	25	99,1	6.297
4	Sendana	15	20.747	34	7.054	0,00	0,00	0,1	7	0,00	0	0,4	28	99,5	7.019
5	Tammerodo Sendana	7	10.778	20	2.156	0,00	0,00	0,6	13	0,00	0	0,5	11	98,9	2.132
6	Tubo Sendana	0	8.364	10	836	0,00	0,00	0,4	3	0,00	0	0,2	2	99,4	831
7	Ulumanda	0	8.417	6	505	0,00	0,00	0,3	2	0,00	0	0,3	2	99,4	502
8	Malunda	0	17.296	30	5.189	0,00	0,00	1,5	78	0,16	8	2,0	104	96,3	4.999
	Jumlah	54	153.869		59.439		9		217		8		292		58.913

Perencanaan Kontinjensi ini adalah skenario ancaman berat, sehingga skenario yang digunakan adalah skenario untuk penanganan penduduk yang mengungsi ke pos-pos pengungsian yang telah direncanakan untuk sejumlah 59.493 jiwa. Adapun dampak bencana ini diperkirakan akan banyak menimbulkan korban dan kerusakan meliputi:

1. Penduduk

Pada Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, Ulumanda dan Malunda sebagaimana yang tergambar dalam Tabel Penentuan Kejadian dan Penilaian Resiko Bencana Banjir disebutkan bahwa jumlah penduduk yang terancam adalah sekitar 59.439 jiwa yang terdiri dari Penduduk bertahan sekitar 58.913 jiwa dan yang harus mengungsi ke Pos-pos pengungsian adalah sekitar 292 jiwa.

2. Pertanian & Kebun

Lahan Pertanian yang terancam sekitar 30 % dan Kebun sekitar 20 %.

3. Tambak/Empang

Lahan Tambak/Empang yang terancam sekitar 20 %.

4. Ternak

Jumlah Ternak yang terancam sekitar 15 %.

5. Fasilitas Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan yang terancam sekitar 25 % dan Jembatan sekitar 25 %.

6. Rencana Lokasi Pengungsian

Seluruh Kantor Camat, kecuali Kecamatan banggae dan kecamatan Pamboang dengan kapasitas 300 jiwa, serta di tempat-tempat ketinggian/bukit.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Dalam rangka penanganan terhadap korban yang ditimbulkan oleh bencana Banjir akibat tingginya curah hujan dan tingginya gelombang pasang air laut, maka perlu diambil beberapa kebijakan agar semua korban dapat segera tertolong, pelayanan kesehatan, pelayanan pengungsi, dan berbagai penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, serta terselenggaranya koordinasi dalam penanggulangan bencana Banjir tersebut diperlukan beberapa kebijakan penting yang harus diambil yaitu :

1. Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat baik sebelum terjadi, saat terjadi maupun setelah terjadi bencana.
2. Mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana yang dilakukan oleh berbagai lembaga baik pemerintah, swasta dan masyarakat;
3. Penanggulangan bencana dilakukan sejak dini untuk mencegah meluasnya dampak bencana, terutama korban manusia,
4. Penanganan bencana dilakukan dengan memprioritaskan keselamatan jiwa manusia, dan target utama kelompok rentan. Bagi korban yang luka-luka diberikan pengobatan Cuma-cuma, sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan;
5. Memantau dan melaporkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana, baik harta benda maupun jiwa.
6. Memastikan bantuan dapat sampai ke daerah pengungsian dengan mengerahkan seluruh petugas, relawan dan armada angkutan .
7. Mendistribusikan bantuan dengan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Strategi

Adapun untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan diatas, maka perlu dioperasionalkan dalam beberapa strategi, yaitu :

1. Mengaktifkan POSKO untuk memantau dan mengendalikan operasi penanganan bencana/kedaruratan.
2. Koordinasi pada POSKO terkait Koordinasi efektif dan efisien terhadap implementasi prosedur tetap yang disusun, menentukan arah / langkah permasalahan yang akan dilaksanakan, serta pembagian tugas pelaksanaan kerja dari unsur yang terkait;
3. Mengerahkan semua sumber-daya dengan mengutamakan sumber-daya dan potensi lokal.
4. Mengerahkan unsur dinas terkait, TNI, POLRI dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat.
5. Prioritas adalah lansia, anak-anak, orang sakit, penyandang cacat, ibu hamil, orang stres;

6. Melakukan penilaian kerusakan serta taksiran kebutuhan dan prediksi perkembangan kejadian untuk tanggap darurat, pemulihan darurat.
7. Menyediakan mobilisasi pengungsi antara lain ambulance, tenaga medis/ obat-obatan, tenda pengungsi/ dapur umum, pangan / air bersih/ MCK/sanitasi dan pelayanan kesehatan gratis bagi pengungsi dan non pengungsi di Puskesmas serta penanganan kesehatan mental/psikologi pengungsi;
8. Pembebasan Biaya Rekening Listrik, Air Bersih dan lain-lain pada Pos/ Tempat Pengungsian;
9. Memberikan laporan pertanggung jawaban tugas yang diberikan dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta tindak lanjut yang direncanakan.
10. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan penanganan bencana.

BAB V
PERENCANAAN SEKTORAL

A. Sektor Manajemen dan Koordinasi (POSKO)

1. Situasi

Sektor ini berfungsi **sebagai pengendali semua kegiatan tanggap darurat bagi sektor-sektor yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat di lapangan**. Sektor ini dibawah komandan pengendali kegiatan tanggap darurat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Majene sebagai pimpinan tertinggi. **Komandan pengendali** operasi akan **dibantu oleh beberapa Koordinator/Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugasnya**. Sektor ini bertugas untuk memastikan bahwa semua kebutuhan sektor-sektor terpenuhi untuk memperlancar dan sinkronisasi kegiatan tanggap darurat di lapangan.

Dalam hal ini Bencana Banjir yang mungkin terjadi akan menimbulkan gangguan atau bahkan melumpuhkan aktivitas masyarakat dan bisa menimbulkan jatuhnya korban jiwa. **Untuk itu perlu upaya untuk menghadapi banjir di Kabupaten Majene secara efektif, efisien dan terpadu**. Untuk mewujudkan penanggulangan bencana khususnya kegiatan tanggap darurat secara efektif, efisien dan terpadu **diperlukan langkah-langkah untuk mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan para pihak** yang terlibat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai institusi/lembaga yang diberikan mandat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah bertugas untuk melaksanakan / memfasilitasi kegiatan manajemen dan koordinasi para pihak tersebut **mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa**.

Pelibat Sektor

No	Lembaga /Instansi	Kontak	Peran
1	BPBD		Mengkoordinasikan seluruh SKPD dan non SKPD (LSM, Ormas, Orpol, Lembaga-lembaga nasional/internasional)
2	Bapeda BPBD		Mengorganisasikan perencanaan-perencanaan sektoral
3	BPBD Bapeda		Mendata, memverifikasi, menyiapkan dan menggerakkan seluruh potensi sumberdaya dari para pihak

4	BPBD & Dishu Infokom		Menampung data darurat kebencanaan
5	Dishub Infokom		Menyebarkan informasi kedaruratan
6	DISHUB INFOKOM		Bertanggung jawab mengakomodir kebutuhan transportasi
7	KECAMATAN		Penanggung jwb & Menyiapkan Posko Pembantu
8	Dinas Sosial		Koordinator, Penanggung Jwb Logistik semua pihak
9	ORARI / RAPI		Meneruskan informasi dari lokasi bencana ke POSKO Bencana Kabupaten
10	TNI POLRI		Mengkoordinasikan pendistribusian sumberdaya & Penanggung jwb Keamanan
11	Dinas Kesehatan		PenanggungJwb & Koordinator Medis
12	BPBD		Mengkoordinasikan penyiapan & pendistribusian sumberdaya
13	BPBD		Koordinator/PenanggungJwb Evakuasi
14	DPKAD		Penanggung jwb Keuangan & admin.

2. Sasaran

- a. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan seluruh komponen dan stakeholder;
- b. Tersedianya data sumberdaya yang ada pada masing-masing pihak;
- c. Terorganisasikannya perencanaan sektoral sesuai kebijakan dan strategi serta kebutuhan menghadapi bencana banjir;
- d. Terkendalinya penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat;
- e. Terkoordinirnya pengerahan sumber daya dari seluruh pihak terkait;
- f. Terlaksananya kegiatan evakuasi dan penyelamatan penduduk dari ancaman banjir;
- g. Terlaksananya kegiatan pengamanan wilayah pada saat situasi darurat;
- h. Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan bagi para penduduk yang terdampak banjir;
- i. Terlaksananya kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang terdampak banjir;

- j. Terlaksananya kegiatan pemulihan darurat bagi fungsi-fungsi infrastruktur dasar yang terdampak;
- k. Terdistribusikannya informasi kesiapan dan penanganan bencana bencana banjir kepada publik.

3. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor	BPBD, TNI POLRI, DISKES, DINSOS/ TAGANA, DISHUB, TRIPIKA, LSM, PRAMUKA, SATPOL PP, PMI, RELAWAN, TOMAS, TOGA, SAR,	Sebelum musim hujan
2	Melakukan pendataan sumberdaya dari seluruh sector		Sebelum musim hujan
3	Mengorganisasikan perencanaan sektoral		Sebelum musim hujan
4	Mengkoordinasikan penyiapan sumberdaya dari seluruh sektor		Memasuki awal musim penghujan
5	Mengaktifkan pusat pengendali operasi (pusdalops) tanggap darurat		Setelah mendapatkan informasi peringatan dini
6	Mengendalikan pengerahan sumberdaya dari seluruh pihak		Sebelum dan pada saat terjadi banjir
7	Menerima dan mendistribusikan informasi terbaru kepada publik		Pada saat tanggap darurat
8	Menyusun laporan kegiatan tanggap darurat		Setiap hari pada saat tanggap darurat dan di akhir kegiatan tanggap darurat

4. Kebutuhan dan Ketersediaan Sumberdaya

Kebutuhan	Perhitungan Kebutuhan			Jmlh Kebutuhan	Ketersediaan		Kesenjangan
	Satuan	Jml	Freq		Jml	Asal	
Posko/Sekretariat					-	-	-
a. Ruang rapat	1	buah		1	-	-	-
b. Meja	10	buah		10	-	-	-
c. Kursi	30	buah		30	-	-	-

d. Papan Informasi	2	buah			1	-	-	-
e. Komputer (Laptop)	3	unit			3	-	-	-
f. Peralatan (ATK)	1	Paket			1	-	-	-
g. Alat Komunikasi						-	-	-
1. Pesawat Rik	8	Set			5	-	-	-
2.Papan Data	8	buah			5	-	-	-
3. Telephone	1	Unit			1	-	-	-
4.Mesin Fax	1	Unit			1	-	-	-
5.Pengeras Suara	3	Tiga			3	-	-	-
6.Peta Rawan Bencana Banjir	1	buah			1	-	-	-
7.HT	20	Unit			20	-	-	-
h. Jaringan Internet	1	Unit			1	-	-	-
i. Kendaraan roda 2	2	Unit			2	-	-	-
j. Media Info						-	-	-
a. Radio Lokal	3	Unit			3	-	-	-
b. Leaflet	1000	Lembar			1000	-	-	-
c. Handicamp	1	Unit			1	-	-	-
d. Camera Digital	1	Unit			1	-	-	-
k. Kendaran Roda 4	1	Unit			1	-	-	-
l. BBM/HARI	75	Liter			75	-	-	-
m. Konsumsi/org	25	Ribu			25	-	-	-

B. Sektor Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

1. Tugas pokok personil evakuasi :

- b. Melakukan pencarian korban
- c. Melakukan penyelamatan dan penilaian medis sesuai dengan kondisi korban yang ditemukan
- d. Memberikan penatalaksanaan gawat darurat medis (pertolongan pertama) sesuai dengan kondisi korban yang ditemukan
- e. Memberikan rujukan atau tindak lanjut sesuai dengan kondisi korban

- f. Pendataan dan dokumentasi korban yang ditemukan
- g. Menyesuaikan kegiatan dengan instansi penanggulangan bencana lainnya
- h. Pembagian area pencarian

Pada saat sebelum terjadi banjir, sektor ini bertugas untuk memfasilitasi penduduk di wilayah rawan banjir untuk mengungsi ke tempat yang aman. Bersama-sama dengan penduduk setempat serta tim siaga desa, sektor ini melakukan tugas untuk menjaga keamanan lingkungan. Pada saat terjadi banjir, sektor ini bertugas melakukan penanganan pertama jika muncul korban, baik yang mengalami cedera maupun korban meninggal dan melakukan koordinasi dengan rumah sakit terdekat untuk melakukan rujukan bagi penduduk yang mengalami cedera serius. Jika muncul laporan kehilangan dari anggota masyarakat yang ditengarai menjadi korban, sektor ini bertugas untuk melakukan pencarian.

Pelibat sektor

No	Lembaga/ Instansi	Nama Kontak	No. Kontak	Peran
1.	TNI			Evakuasi dan keamanan
2.	Polri			Evakuasi dan keamanan
3.	Satpol PP Majene			Evakuasi
4	BPBD Majene			Koordinasi dan Komando
5	PMI			Evakuasi dan PP
6	Forum Relawan BPBD kab.Majene (Tagana, dll)			Evakuasi
7	Trantib Kecamatan			Evakuasi
8				

Tim Reaksi Cepat, terdiri dari :

- Kabupaten :
- TNI : 1 SST (31 orang)
- POLRI : 1 SST (31 orang)
- POL PP : 1 Pleton (31 orang)
- LSM : 10 Orang
- Masyarakat : 10 Orang

- Kecamatan
- TNI : 60 Orang (8 Kecamatan)
- POLRI : 60 Orang (8 Kecamatan)
- LSM : 25 Orang (8 Kecamatan)
- Masyarakat : 50 Orang (8 Kecamatan)
- Pol PP / Trantib : 30 Orang (8 Kecamatan)

JUMLAH : 338 Orang

Tabel
Kebutuhan Sektor SAR Majene

NO	NAMA BARANG	TYPE	BANYAK			HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)	KET
			KEBU TUHA N	TERS EDIA	KEKU RANG AN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Scuba	Dacor	2	0	2	16,000,000	32,000,000	
2	Tabung Oksigen 5000 ml	GEA/ 6 M3	2	0	2	2,000,000	4,000,000	
3	G P S	Garmin	2	0	2	3,500,000	7,000,000	
4	Kompas	Sunto	2	0	2	300,000	600,000	
5	Peta Topografi	Jantop-AD	2	0	2	100,000	200,000	
6	Masker	3M	1,000	0	1,000	4,000	4,000,000	
7	Kendr.Roda 4	Minibus	2	0	2	0	0	
8	Motor Trail	Kawasaki	4	0	4	0	0	
9	Rescue	Ford Jeep	1	1	0	0	0	
10	Perahu Karet	Avon	2	0	2	15,000,000	30,000,000	
11	Kamera Digital	Nikon	2	0	2	2,000,000	4,000,000	
12	Chain Saw	Shill	2	0	2	5,000,000	10,000,000	
13	Kompresor Scuba	Bower	2	0	2	0	0	
14	Kantong Mayat	-	100	0	100	0	0	
15	Sepatu boot	AP	50	0	50	25,000	1,250,000	
16	Life Jaket	-	50	0	50	300,000	15,000,000	
17	HT	Kenwood	30	0	30	1,500,000	45,000,000	
18	Papan Informasi	-	1	0	1	200,000	200,000	
JUMLAH							153,250,000	

C. Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan bertugas untuk memberikan Pelayanan kesehatan baik pada saat terjadi banjir, maupun bagi korban yang terdampak banjir. Sector ini mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada penduduk yang kena dampak, baik yang tidak mengungsi (Bertahan di lokasi bencana) maupun yang berada dilokasi pengungsian serta penduduk yang mengalami cedera / luka yang berada di masing masing posko pelayanan dan rumah sakit rujukan.

1. Situasi

Banjir akan menyebabkan sejumlah penduduk menderita cedera/luka, terpapar penyakit, bahkan mungkin akan menimbulkan korban jiwa dan sebagian besar penduduk harus mengungsi ke tempat yang aman. Kondisi pengungsian yang minim sarana dan prasarana juga akan menyebabkan ancaman ; menurunnya kualitas kesehatan bagi para penduduk yang berada dipengungsian.

- Kabupaten Majene, untuk sarana prasarana mempunyai RSUD Tipe C 1 Unit , Puskesmas 11 Unit, Pustu 34 Unit, Polindes 19 Unit dan Poskesdes 39 Unit. Mobil Ambulance 5 Unit, Mobil Puskel 10 Unit.
- Jumlah Korban bencana/lokasi/kondisi
 - Jumlah Penduduk Kab. Majene : 153.869
 - Jumlah Orang yang terkena dampak = 59.439 Jiwa
 - Jumlah Korban Jiwa :
 - a. Luka – luka : 217 orang
 - Meninggal : 9 org
 - Luka ringan : 175 org
 - Luka sedang : 40 org
 - Luka Berat/Patah Tulang : 2 org
 - b. Kasus lain : Kejadian Penyakit
 - Diare
 - Malaria
 - ISPA
 - Peny. Kulit
 - DBD
 - Leptospirosis
 - Kondisi Masyarakat: ketakutan, panik, dan Mengungsi ketempat yang lebih aman.

- **Lokasi kejadian**

- Wilayah Kab. Majene : 35 % dari seluruh wilayah
- Kena dampak terhadap penduduk : 38,6% (59.439 jiwa)

Keterangan :

- Tim reaksi cepat pelayanan kesehatan : 2 Tim (Selatan dan Utara)

- Posko Kesehatan di 4

Lokasi :

- Kec. Banggae (rumah jabatan Bupati)
- Kec. Banggae Timur (Kantor Camat)
- Kec. Pamboang (Lapangan Sepak bola Adolang)
- Kec. Malunda (Desa Bambang)

- Puskesmas buka 24 jam sebanyak 5 unit :

- (1) Puskesmas Sendana
- (2) Puskesmas Tammerodo
- (3) Puskesmas Onang
- (4) Puskesmas Sambabo
- (5) Puskesmas Ulumanda

2. Sasaran

- a. Terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal dan merata bagi para penduduk yang mengungsi, dengan mendirikan Posko Pelayanan Kesehatan di 4 tempat yaitu:
 - ✓ Posko Induk : rumah jabatan Bupati
 - ✓ Kec. Banggae : (Puskesmas Rangas)
 - ✓ Kec. Banggae Timur (Kantor Camat)
 - ✓ Kec. Pamboang (Pustu Sirindu)
 - ✓ Kec. Malunda (Pustu Lombong)
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia bidang kesehatan yang profesional;
- c. Tersedianya Rumah Sakit Rujukan beserta tenaga dan sarannya (RSUD Majene)
- d. Terlaksananya penanganan lanjutan bagi penduduk yang mengalami cedera / luka akibat banjir;
- e. Terlaksananya rujukan kesehatan yang optimal.
- f. Terkirimnya laporan mengenai perkembangan situasi dan kondisi kesehatan kepada instansi terkait sesuai dengan format yang ada.

3. Kegiatan

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU
1	Menyiapkan Tim Kesehatan		
	Tim reaksi cepat pelayanan kes.	RSU, DINKES, PMI,	Hari I kejadian

2	Menyiapkan obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan	DINKES, RSUD	Sda
3	Menyiagakan ambulance	DINKES, RSUD	Sda
4	Pelayanan Rujukan	DINKES, RSUD	Hari ke – I / II
5	Membentuk pos kesehatan	DINKES, PMI, Pramuka SBH	Hari ke- II dst
6	Mengaktifkan Puskesmas yang tidak terkena bencana selama 24 jam (sebanyak 7 unit)	DINKES	Sda

4. Kebutuhan dan Ketersediaan Sumberdaya

NO	JENIS KEBUTUHAN	STANDAR	VOL	HARI	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN		KEKURANGAN	HARGA SAT (Rp)	JUMLAH BIAYA (RP)	KET
						KAB/KOTA	PROV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dr. Bedah (Transport)	1 per Kab.	1	7	1	1	0	0	100,000	700.000	
2	Dr. Anastesi	1 per Kab.	1	7	1	0	0	1	100,000	700.000	
3	Dr. Umum	2 per Posko	4	7	8	27		0	100,000	5.600.000	
4	Perawat/Bidan	4 per Posko	4	7	16	470		0	50,000	5.600.000	
5	Tenaga Supir	1 per Posko	4	7	4	25		0	50,000	1.400.000	
6	Sanitarian	1 per Posko	4	7	4	28		0	50,000	1.400.000	
7	Ahli Gizi	1 per Posko	4	7	4	18		0	50,000	1.400.000	
8	Relawan PMI	2 per Posko	4	7	8	130		0	50,000	2.800.000	
10	Psikolog	1 per prov	4	7	1	0	1	1	100,000	4,200,000	
11	Tim reaksi cpt	2 per Posko	4	7	8	20		0	50.000	2.800.000	
12	Ulama	7 per prov	4	7	7	56		0	100,000	700,000	
JUMLAH										27.300,000	

Kebutuhan Bahan Habis Pakai

NO	JENIS KEBUTUHAN	STANDAR	VOL	HARI	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN		KEKURANGAN	HARGA SAT (Rp)	JUMLAH BIAYA (RP)	KET
						KAB/KOTA	PROVINSI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Obat & bahan habis pakai	30% per org	59,439	7	17,832	10,000	6,000	1,832	10,000	18,320,000	
2	Obat Spesialis	10% per org	59,439	7	5,944	4,000	1,000	944	30,000	28,320,000	
3	Tabung Oksigen	1 per Posko	4	7	4	2	1	1	1,000,000	1,000,000	
4	Darah	2 per Posko	4	7	8	0	0	2	250,000	500,000	
5	Isi Ulang Tabung Oksigen	1 per Pup	4	7	4	0	0	4	100,000	400.000	
6	Infus Lengkap	100 per Posko	4	7	400	0	0	400	25,000	10.000.000	
7	Cairan Infus	100 per Posko	4	7	400	0	0	400	10,000	4.000,000	
8	Alat Suntik Disposable	100 per Posko	4	7	400	200	100	100	3,000	300,000	
9	Stetoscope	2 per Posko	4	7	8	0	0	8	60.000	480.000	
10	Tensimeter	2 per Posko	4	7	8	0	0	8	200.000	1.600.000	
11	Minor Surgery	1 per Posko	4	7	4	0	0	4	200.000	800.000	
12	Sepatu Bot	2 per Posko		7	8	0	0	8	50.000	400.000	

				4								
13	Jas Hujan	2	per	pos ko	4	7	8	0	0	8	50.000	400.000
14	Tengki Air	1	per	pos ko	4	7	4	0	0	4	100.000	400.000
15	Genset	1	per	pos ko	4	7	4	0	0	4	1.500.000	6.000.000
16	Tikar	4	per	pos ko	4	7	16	0	0	16	50.000	800.000
17	Masker	50	per	pos ko	4	7	200	0	0	200	2500	500.000
18	Sarung Tangan	100	per	pos ko	4	7	400	0	0	400	5000	2.000.000
19	Senter	2	per	pos ko	4	7	8	0	0	8	50.000	400.000
20	Tandu	2	per	pos ko	4	7	8	20	0	0	0	0
21	Handy Talky	1	per	pos ko	4	7	4	10	0	0	0	0
22	Papan Data	1	per	pos ko	4	7	4	0	0	4	50.000	200.000
23	Peta	1	per	pos ko	4	7	4	10	0	0	0	0
24	Lemari Peralatan Medis	1	per	pos ko	4	7	4	0	0	4	150.000	600.000
25	ATK	1	per	pos ko	4	7	4	0	0	4	200.000	800.000
26	BBM	250	per	am bul anc		7	1.000	0	0	1.000	5.000	5.000,000

			e	4									
27	Kantong Mayat	3	per	pos	ko	4	7	12	0	0	12	200,000	2.400.000
28	Kend. Roda 4	1	per	pos	ko	4	7	8	15	0	0	0	0
29	Kend. Roda 2	2	per	pos	ko	4	7	8	60	0	0	0	0
													86.140.000

D. Sektor Logistik/Dapur Umum

Sektor ini bertugas untuk memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi para penduduk yang mengungsi. Tanggungjawab sektor ini adalah menyediakan logistik yang dibutuhkan di lokasi pengungsian.

1. Sasaran

- a. Tersedianya logistik untuk kebutuhan korban bencana;
- b. Penyaluran barang logistik yang merata pada korban bencana
- c. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi bagi korban bencana
- d. Terwujudnya layanan pangan, sandang yang dibutuhkan pengungsi dan dibedakan antara laki-laki dan perempuan;

2. Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	<ul style="list-style-type: none"> - Mengolah data sebagai acuan dalam pendistribusian logistic, mendirikan tenda dan dapur Umum - Mendistribusikan Logistik kepada Korban Bencana 	Dinsos, BPBD, Tagana, PMI	Tanggap Darurat
2	<ul style="list-style-type: none"> - Menghitung Jumlah Kebutuhan Pangan Yang Dibutuhkan oleh korban bencana dalam hal pendistribusian pangan - Memperhatikan akses dalam penyediaan pangan kelokasi korban bencana 	Ketapang, Dinsos	Tanggap Darurat
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan Tenaga-Tenaga Terampil Untuk Membantu Pendistribusian Logistic Dan DU - Membantu Pendanaan Dengan Cara Menggalang Para Dunia Usaha Untuk Membantu 	Dunia Usaha, PMI,	Tanggap Darurat

Keperluan Logistic Dan DU.			
4	-	Melaksanakan pengamanan ditempat penampungan barang logistic	POLRI
	-	Melaksanakan pengamanan pada saat pendistribusian logistic ketempat lokasi bencana	Tanggap Darurat

3. Kebutuhan

No.	Jenis Kebutuhan	Standar	volume	Jumlah Kebutuhan	Persediaan	Kekurangan	Harga Satuan	Jumlah
1	Beras	400 Gr	59,205	165,774 Kg	100 Ton		Rp 6,000	Rp 994,644,000
2	Peralatan Dapur Umum	Paket	2	2 Paket	2			
3	Tenda Dapur Umum	Paket	2	2 Paket	5			
4	Air Bersih	Liter	59,205	3,315,480 Liter	-			
5	Mie Instan	Bks	59,205	828,870 Bks	-		Rp 1,500	Rp 1,243,305,000
6	Lauk-Pauk	Dos	59,205	987 Dos	-		Rp 50,000	Rp 49,337,500
7	Minyak Goreng				-			
8	Sarung	Lembar	292	292	-		Rp 15,000	Rp 4,380,000
9	Selimut	Lembar	292	292	400		Rp 15,000	Rp 4,380,000
10	Pakaian	Stel	584	584			Rp 30,000	Rp 17,520,000
11	Perlengkapan Mandi/Family Kits	Paket	292	292 Paket	400		Rp 5,000	Rp 1,460,000
12	Tikar	Lembar	292	292 Lembar	500			
13	Perlengkapan Ibadah	Paket						
14	Food Ware	Paket					Rp 300,000	
15	seragam Sekolah	Stel			100		Rp 50,000	
16	Gula		59,205	41,444 Kg	-		Rp 11,000	Rp 455,878,500
17	Kopi		59,205	8,289 Kg	-		Rp 20,000	Rp 165,774,000

18	Tea				-			
19	Kids Ware	Paket			-		Rp 250,000	
JUMLAH								Rp 2,936,679,000

E. Sektor Sarana dan Prasarana (Infrastruktur)

1. Situasi

Apabila terjadi bencana banjir, sebagian dan seluruh penduduk yang berada di pinggir laut akan menyelamatkan diri ke tempat yang aman (ketinggian) yang telah di tunjuk bpbd, dimana rumah masyarakat sebagian kebanjiran.

Sarana dan prasarana yang rusak adalah sebagai berikut :

- Jembatan : \pm 60 unit
- Jalan : \pm 30 km
- Air bersih : \pm 8 kecamatan
- Jaringan Listrik : \pm 30 km

- Pohon tumbang : 300 buah

- Lampu jalan : 100 unit

b. Sasaran

- Tersedianya jalur penyelamatan / evakuasi ke tempat yang aman.
- Tersedianya areal pengungsian dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- Pulihnya seluruh sarana dan prasarana seperti jalur transportasi, sarana air bersih, sarana kesehatan dll.

c. Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1.	Menyiapkan jalur evakuasi	PU,Perkim,& BPBD	Pada saat Tanggap Darurat
2.	Menyiapkan lokasi evakuasi dan sarana : Pos Kesehatan, Air Bersih, MCK, Tempat Ibadah, Sekolah darurat	PU, PDAM, Depkes,Diknas,B LH&P, Kem.Agama	Pada saat Tanggap Darurat
3.	Memulihkan jalur transportasi (jalan dan jembatan)	PU	Pada saat Tanggap Darurat
4.	Memulihkan jaringan listrik	PLN	Pada saat Tanggap Darurat
5.	Memulihkan sarana air bersih	PDAM	Pada saat Tanggap Darurat
6.	Memulihkan jaringan komunikasi	TELKOM	Pada saat Tanggap Darurat

d. Standar

1. Areal aman / evakuasi dengan ketinggian ≥ 15 meter dengan jalur transportasi yang memadai dan ketentuan luas areal adalah 300 jiwa / Ha
2. Air bersih 15 ltr/hari/jiwa
3. M.C.K : 15unit, ukuran 5,5 x 10 m / 300 jiwa
4. Tempat ibadah : 1 unit, ukuran 5,5 x 10 m / 300 jiwa
5. Sekolah darurat : 1unit, ukuran 5,5 x 10 m / 300 jiwa
6. Pos kesehatan : 1unit, ukuran 5,5 x 10 m / 300 jiwa
7. Sarana air bersih 1 unit kapasitas 2 ltr/hari x 300 jiwa x 7 hari
8. Membangun jembatan darurat, bentang ± 4 m' : 0,5 m³ kayu / m'
9. Pemulihan jalan : 1 Excavator + 2 Dump truk / 10 km jalan
10. Pemulihan jaringan komunikasi □ diserahkan kepada TELKOM
11. Pemulihan jaringan listrik □□diserahkan kepada PLN

e. Proyeksi Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya

No.	Jenis kebutuhan	Standar	Vol	Total Kebutuhan	Persediaan	Kekurangan	Harga satuan	Jumlah	Ket.
1.	Hidrant Umum	Unit	Bh	280	40	240			
2.	Water Meter	Unit	Bh	225	0	225			
3.	Pipa 4 inch	Inch	Btg	800	0	800		4 M per btg	
4.	Pipa 3 inchi	Inch	Btg	577	0	577			
5.	Pipa 2 inchi	Inch	Btg	740	0	740			
6.	Mobil Dapur Umum	Unit		3 unit	2 unit	1 unit		1 mobil=100 orang (BPBD)	
7.	Grader	Unit		8 unit	1 unit	7 unit			
8.	Loader	Unit		8 unit	1 unit	7 unit			
9.	Excavator	Unit		3 unit	2 unit	1 unit			
10.	Dump Truck	Unit		10 unit	3 unit	7 unit			
11.	Mobil Tangki Air	Unit		6 unit	6 unit	0		1 mobil = 2 m3	
12.	Mobil Truk Operasional	Unit		15 unit	7 unit	8 unit		1 mobil = 20 orang	
13.	BBM	Liter	100 Lt	7.000 lt	5.000 lt	2.000 lt		100x10x7	
14.	Kayu Jemb	M3		60 m3	0	60 m3		1 m3 Per jembatan	
15.	SDM	Teknis operator		12 orang	20 orang				
16.	Tenda Peleton	Unit		5 unit	5 unit	0		30 orang	
17.	Tenda Regu	Unit			7 unit	0			
18.	Tenda Keluarga	Unit			5 unit	0			
19.	Tenda Posko	Unit			1 unit	0			
20.	Tenda Dapur			1 unit	1 unit	0			
21.	Somel	Unit		3 unit	1 unit	2 unit			
22.	Chainsaw			12 buah	1 unit	11 unit			
23.	Senter Sorot			20 buah	1 unit	19 unit			
24.	Motor Trailer			16 unit	2 unit	14 unit			

25.	Truk Tronton			1 unit	1 unit	0			
26.	HT			20 buah	33 unit	0			
27.	Stone Walas			2 unit	2 unit	0			
28.	Mega Phone			8 unit	6 unit	2 unit			
29.	Kapal Motor			4 unit	1 unit	3 unit			
30.	Genset			8 unit	5 unit	3 unit			
31.	Cangkul	Buah		100 bh	0	0			
32.	Sekopan	Buah		100 bh	0	0			
33.	Linggis	Buah		50 bh	0	0			
34.	Konsumsi	Orang		40 orang	0	0			
35.	MCK	unit		15 unit	0	0			
JUMLAH DANA YANG DIBUTUHKAN									

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Rencana kontinjensi banjir di Kabupaten Majenen disusun berdasarkan kesepakatan seluruh unsur baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat yang terkait dengan penanggulangan bencana banjir musim hujan tahun 2012 – 2013.
2. Rencana Kontinjensi ini disetujui dan ditandatangani serta menjadi komitmen bersama oleh setiap unsur yang terlibat dalam penyusunan.
3. Untuk menguji ketepatan Rencana Kontinjensi yang telah disusun, maka perlu dilakukan uji coba dalam bentuk simulasi atau gladi. Dalam gladi ini diusahakan supaya besaran dan skalanya mendekati peristiwa/kejadian yang di-skenario-kan. Apabila tidak memungkinkan, dapat diambil sebagian dari luas yang sesungguhnya.
4. Rencana Kontinjensi diaktivasi menjadi Rencana Operasi pada saat terjadi bencana setelah dilakukan penilaian awal secara cepat dan penyesuaian komponen kebutuhan sesuai kondisi dan intensitas bencana.
5. Koordinasi secara berkala untuk memperbarui dokumen Rencana Kontinjensi ini perlu dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan termasuk *updating* data ketersediaan sumber daya pada masing-masing instansi.
6. Perlu dilakukan identifikasi kerentanan wilayah rawan bencana yang meliputi berbagai aspek antara lain sosial, perumahan, infrastruktur, dan lingkungan.
7. Inventarisasi persediaan (*buffer stock*) untuk pemenuhan kebutuhan darurat perlu diselenggarakan dengan manajemen logistik yang baik.
8. Perlu dibangun jejaring yang lebih luas (termasuk dengan lembaga usaha) agar seluruh sumber daya di Kabupaten Majene dapat dioptimalkan dalam penanggulangan bencana baik dalam tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana.
9. Perlu upaya semua pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang mungkin terjadi melalui beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Penyuluhan, pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pada masyarakat di wilayah rawan bencana.

- b. Melengkapi peralatan bencana termasuk menyiapkan jalur evakuasi pada wilayah rawan bencana.
 - c. Mengoptimalkan peran fungsi Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops).
10. Mempersiapkan masa transisi ketika menghadapi potensi terjadinya bencana dengan kemungkinan 2 (dua) kemungkinan, yaitu terjadi bencana atau tidak terjadi bencana.
- a. Apabila terjadi bencana:
 - Jenis bencana yang terjadi sama/sesuai sebagaimana diperkirakan sebelumnya, maka rencana kontinjensi diaktivasi/diaplikasikan menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat.
 - Rencana operasi tersebut menjadi pedoman bagi POSKO untuk penanganan darurat yang didahului dengan kaji cepat untuk penyesuaian data dan kebutuhan sumberdaya.
 - Jenis bencana yang terjadi tidak sama dengan yang diperkirakan dalam rencana kontinjensi, maka komponen kebutuhan sumberdaya mengalami perubahan sesuai dengan jenis ancaman dan kebutuhan berdasarkan hasil kaji cepat.

Beberapa hal yang perlu dilakukan apabila bencana terjadi:

- Rapat Koordinasi
Segera setelah terjadi bencana, dilakukan rapat koordinasi penanggulangan bencana untuk melakukan hal-hal berikut:
 - aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi POSKO.
 - penetapan dan pengiriman Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lapangan untuk melakukan kaji cepat (rapid assessment) untuk pendataan korban, kerusakan/kerugian, kebutuhan dan kemampuan sumberdaya serta prediksi perkembangan kondisi ke depan. Hasil kerja TRC menjadi acuan untuk melakukan tanggap darurat dan pemulihan darurat prasarana dan sarana vital.
- Pelaksanaan Operasi Tanggap Darurat
Sektor-sektor yang telah dibentuk segera melaksanakan tugas tanggap darurat sampai dengan kondisi darurat pulih/kembali ke kondisi normal.
- Evaluasi
Evaluasi berkala/rutin dilakukan terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat, yang hasilnya antara lain berupa:
 - pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.

- perpanjangan masa tanggap darurat (jika diperlukan).
- pernyataan secara resmi berakhirnya tanggap darurat.

b. Apabila tidak terjadi bencana:

- Apabila waktu kejadian bencana yang diperkirakan telah terlampaui (tidak terjadi bencana), maka rencana kontinjensi dapat diberlakukan atau diperpanjang untuk periode/kurun waktu tertentu berikutnya.
- Apabila setelah melalui kaji ulang dan perpanjangan masa berlaku ternyata tidak terjadi bencana, rencana kontinjensi dapat di deaktivasi (dinyatakan tidak berlaku) dengan pertimbangan bahwa potensi bencana tidak lagi menjadi ancaman. Rencana kontinjensi yang telah di-deaktivasi dapat diaktifkan kembali setiap saat (aktivasi) jika diperlukan.

11. Kembali dari kondisi darurat kesiapsiagaan ke kondisi normal (Re-entry)

Re-entry adalah proses kembali dari kondisi darurat kesiapsiagaan ke kondisi normal. Dilakukan setelah masa kedaruratan berakhir untuk mengetahui kekurangan/kelemahan apa yang terjadi pada saat melaksanakan operasi tanggap darurat.

Memetik manfaat dari perencanaan kontinjensi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam sistem penanggulangan bencana melalui berbagai kegiatan, misalnya penyusunan kebijakan, pembuatan prosedur tetap/SOP, penyebaran/ sosialisasi kebijakan dan kegiatan-kegiatan lainnya, dalam rangka penyempurnaan upaya penanggulangan bencana.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kontinjensi ini dibuat sebagai acuan dan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan segenap unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir pada Tahun 2012 - 2013.

Jumlah anggaran biaya yang muncul dari beberapa sektor yang termuat dalam Rencana Kontinjensi ini bukan merupakan Daftar Isian Kegiatan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi merupakan proyeksi kebutuhan apabila bencana seperti yang diskenariokan benar-benar terjadi. Kebutuhan ini dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, lembaga usaha, maupun masyarakat.

Rencana kontinjensi ini masih perlu penyempurnaan dan *review* secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi.

Majene, Juli 2012

KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

BUPATI

No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Kepala Pelaksana BPBD		
3.	Biro Hukum		

